

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Semua organisasi, baik bisnis maupun publik, berkonsentrasi pada pencapaian kinerja terbaik. Pemerintah bertanggung jawab atas pencapaian misi dan tujuan organisasi dan menjalankan akuntabilitas kinerja untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pemerintah telah tercapai selama periode waktu tertentu. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah (Presiden Republik Indonesia, 1999).

Pengukuran kinerja adalah komponen penting dalam suatu organisasi, termasuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja dilakukan untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah, dengan tujuan membantu pemerintah fokus pada tujuan program unit kerja, sehingga dapat mencapai tujuan mereka (Mardiasmo, 2009).

Adanya peningkatan kebutuhan akan pengukuran kinerja lembaga sektor publik karena masyarakat menjadi semakin cerdas dan kritis di era modern ekonomi, yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas publik dari lembaga sektor publik. Serangkaian reformasi kelembagaan, termasuk UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, digunakan untuk membangun pemerintahan yang baik, yang berarti pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Selain itu, evaluasi kinerja dilakukan karena sektor publik selama bertahun-tahun dianggap sebagai tempat pemborosan dan pembocoran dana. Untuk organisasi sektor publik untuk mempertimbangkan kinerja dengan mempertimbangkan input, output, dan *outcome*.

*Value For Money* digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi pemerintah, menurut Mardiasmo (2013). Tujuan yang diinginkan masyarakat adalah untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan *Value for Money*, yang berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya secara ekonomis (hemat cermat), efisien (berdaya guna), dalam arti bahwa sumber daya digunakan dengan cara yang paling efisien dan menghasilkan hasil yang paling maksimal, dan efektif (berhasil guna) dalam arti bahwa sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan dan tujuan.

Pengukuran rasio ekonomi, diperlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya (Mahsun, 2014). Rasio efisiensi adalah cara untuk mengukur seberapa baik pemerintah daerah berhasil meningkatkan pendapatan dengan menggunakan penghematan biaya yang lebih sedikit. Rasio ini menunjukkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan pendapatan yang diterima. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan pendapatan, dan rasio efisiensi menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah (Halim, 2013). Mardiasmo (2013) juga mengatakan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan secara sederhana, itu adalah perbandingan hasil dengan input. Rasio efektivitas yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang semakin efektif.

Salah satu instansi pemerintah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 88 Tahun 2016 menetapkan kedudukan, struktur, tugas, dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang bertanggung jawab atas pengawasan keuangan Kabupaten

Pasaman Barat.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan sepuluh (10) kegiatan dalam lima (5) program yang sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pada tahun 2019 dan 2020.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Felia, 2021) mengenai Analisis *Value For Money* pada Kinerja Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019, akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau tidak memenuhi prinsip *Value for Money*. Ada sembilan (9) program dan 34 kegiatan yang dilakukan, tetapi hanya satu (1) dari 34 kegiatan (2,94%) yang memenuhi tiga (3) elemen *Value for Money*. Pada tahun 2019, ada sepuluh (10) program dan 41 kegiatan yang dilakukan, tetapi hanya dua (2) dari 41 kegiatan (4,88%) yang memenuhi tiga (3) elemen *Value for Money*. Kepala dinas harus berusaha lebih keras untuk mengoptimalkan kegiatan yang sudah direncanakan. Jadi, kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau tidak memenuhi prinsip *Value for Money*. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, yang dilakukan pada tahun 2019 dan 2020. Oleh karena itu, hasilnya berbeda karena penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi dan efektivitas?”.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi setor publik yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dengan analisis *Value for Money* dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari khususnya mengenai akuntansi sektor publik dengan berfokus pada masalah konsep *value for money*.

#### b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus umpan balik mengenai pengukuran kinerja kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat sehingga dalam melaksanakan program atau kegiatan di masa depan dapat berjalan secara ekonomi, efisien dan efektif.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan informasi kepada pembaca tentang latar belakang masalah mengenai Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi beberapa konsep yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil yang diperoleh setelah melakukan pengolahan data, yaitu hasil deskripsi penelitian yang



dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip).

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

